

FRAUD DAN MONITORING DALAM PERSPEKTIF TEORI KEAGENAN

Princessa CHENKIANI¹, Arihadi PRASETYO²¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia.

Email: Princessaleifchenkiani04@gmail.com

²Dosen Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia.Corresponding Author. Email: arihadi.prasetyo@kwikkiangie.ac.id

Article Info	Abstract
Article History: Submission : 29-08-2023 Revised : 30-08-2023 Accepted : 31-08-2023	<i>Financial fraud committed by agents at the company can have an impact on the destruction of the company which is detrimental to the owner, to control fraud in the context of the agency theory approach can be carried out with various mechanisms that can be applied to companies, to avoid intentional or unintentional mistakes. To avoid intentional errors in financial reports or fraud, in this study researchers tried to see the effect of various mechanisms implemented such as the Audit Committee, Institutional Ownership, Managerial Ownership, and Internal Control against fraud. The data analysis technique used is the quantitative method, which includes coefficient similarity tests, descriptive statistics, and logistic regression tests. The number of property and real estate companies as a sample is 38 companies with a research period of 2017-2021. The results of this study indicate that the variables Audit Committee, Institutional Ownership, Managerial Ownership, and Internal Control are not significant in reducing the tendency for fraud to occur.</i>
Keywords: Beneish M-score, fraud, Komite audit, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Pengendalian Intern	
Citation: Chenkiani, P., & Prasetyo, A. (2023). FRAUD DAN MONITORING DALAM PERSPEKTIF TEORI KEAGENAN, <i>Jurnal Akuntansi</i> Vol. 12 (2)	
DOI https://doi.org/10.46806/ja.v12i1.1016	
URL: https://jurnal.kwikkiangie.ac.id/index.php/JA/article/view/1014/726	

1. Pendahuluan

Pendelegasian kewenangan kekuasaan dari prinsipal kepada agen bukan tidak memiliki resiko bagi prinsipal, mengingat baik pihak agen maupun pihak prinsipal memiliki kepentingan yang berbeda, perbedaan kepentingan ini mengganggu tujuan pendirian perusahaan yaitu memakmurkan kekayaan pemegang saham. Agen dalam melaksanakan mandat yang diterima, tidak jarang muncul perilaku menyimpang yang dilakukan dengan berbagai cara seperti halnya rekayasa laporan keuangan, menyebabkan informasi yang dihasilkan terdistorsi, yang dapat menyesatkan pengguna informasi laporan keuangan, mengingat informasi yang diberikan memiliki masalah kejelasan, kelengkapan, dan juga memberikan gambaran secara tepat mengenai peristiwa-peristiwa ekonomi. Suatu laporan keuangan diharuskan menunjang kualitas informasi, dengan tujuan perusahaan publik menerbitkan laporan keuangan yang menunjukkan kinerja terbaiknya.

Dikutip dari hasil survei *frauds* di Indonesia oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* pada tahun 2019 menemukan terjadinya kasus *fraud* dari 239 kasus menyatakan 167 kasus terkait korupsi yang merugikan, 50 responden menyatakan kasus penyelewengan kekayaan Negara & Perusahaan menyebabkan kerugian, sedangkan 22 responden menyatakan kasus terkait dengan *Fraud* laporan Keuangan. mengakibatkan kerugian keuangan akibat *fraud* total Rp.873.430.000.000 dengan rata-rata kerugian per kasus sebesar Rp.7.248.879.668. Berdasarkan kasusnya, kerugian akibat Korupsi sebesar Rp373.650.000.000, kerugian Penyalahgunaan Aset sebesar Rp257.520.000.000 dan kerugian atas *Fraud* Laporan Keuangan sebesar Rp242.260.000.000 (*Association of Certified Fraud Examiners Indonesia*, 2019).

Skandal yang melibatkan dua perusahaan BUMN asuransi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) yang dilakukan PT Hanson Internasional Tbk, dimana baik PT Jiwasraya maupun PT. Asabri menempatkan danan asabahnya dengan nominal yang cukup besar pada PT Hanson Internasional Tbk. Dengan cara menempatkan dananya melalui saham, investasi juga digunakan untuk pembelian medium term note (MTN). OJK menjelaskan PT Hanson internasional Tbk. Terindikasi memanipulasi laporan keuangan tahunannya untuk periode tahun 2016. Manipulasi ditemukan dalam penyajian akun penjualan kavling siap

bangun (kasiba) dengan nilai kotor sebesar Rp 732 miliar, sehingga pendapatan perusahaan meningkat dengan tajam (Muhammad Idris, 2020).

Seyogianya laporan keuangan publikasian perusahaan memiliki tujuan untuk menunjukkan kinerja terbaik perusahaan tersebut, karena laporan keuangan tidak hanya menyajikan angka melainkan juga informasi kinerja keuangan, tetapi juga posisi keuangan perusahaan tersebut. Dalam mencegah terjadinya *fraud*, penerapan tatakelola yang baik menjadi penting dalam mewujudkan budaya jujur, etika yang tinggi, beberapa mekanisme tatakelola yang baik antara lain adanya komite audit yang bertugas membantu dan melakukan pengawasan; kepemilikan instutsional yang memiliki fungsi penting yaitu mengawasi dan mendisiplinkan manajer; dan kepemilikan manajerial memberi manfaat dimana manajer ikut ambil bagian dalam kepemilikan saham perusahaan; pengendalian internal juga diperlukan karena hasil dari laporan dapat dibuktikan keandalannya, tidak hanya berguna bagi pemeriksaan lanjut oleh pihak audit eksternal tetapi juga sebagai pengawas dalam sistematika penyusunan laporan keuangan agar berkualitas. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK.06/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan (Perseroan) Di bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan. Di mana para Pemangku Kepentingan diwajibkan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan, disisi lain direksi dituntut untuk menyusun pedoman tata kelola yang memuat pedoman Direksi, Manajemen risiko, Sistem Pengendalian internal, Mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Persero yang bersangkutan tata kelola teknologi informasi, dan kode etik (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015).

1.1 Teori Agensi

Dalam perspektif teori keagenan yang berfokus pada hubungan antara pemilik dan manajer dalam suatu perusahaan, Hubungan yang dikenal dengan Prinsipal – Agen secara teori mengakui potensi konflik kepentingan diantara kedua belah pihak , yang mana mengarah pada tindakayang dapat merugikan prinsipal, seperti misalnya *fraud* seperti dipaparkan Jensen & Meckling (1976), Teori keagenan merupakan teori yang mendefinisikan relasi antara dua pihak yaitu prinsipal (pemilik) dan agen (pihak manajemen dalam usaha). Prinsipal merupakan suatu pihak yang memiliki wewenang untuk menginstruksikan agen dalam melakukan jasa atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang memiliki wewenang yang diberikan untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua pihak tersebut mengarah pada tujuan yang sama, maka pihak agen akan melaksanakan dan mendukung segala perintah yang diarahkan oleh pihak prinipal.

Dalam Ijudien (2018) menyebutkan bahwa manajemen memiliki peran sebagai agen yang memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan kepada para pemilik, namun di sisi lain manajer juga memiliki kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, *conflict of interest* atau perbedaan kepentingan antara para pemegang saham dan agen merupakan hal yang dapat memicu agency problem sehingga dapat mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan. *Conflict of interest* dapat memicu terjadinya asimetri informasi dimana agen sebagai pihak internal memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan oleh prinsipal. Beberapa hal tersebut menimbulkan terjadinya *fraud*, upaya untuk menurunkan *fraud* dalam perspektif teori keagenan menjadi tujuan yang paling penting, mengingat kecurangan merugikan prinsipal, adanya asimetri informasi dimana agen memiliki informasi mengenai kegiatan dan transaksi perusahaan , yang dapat dieksploitasi. Sistem insentif yang dirancang secara layak mendorong agen untuk memaksimalkan kepentingannya. Monitoring dan Pengendalian memastikan bahwa manajemen yang mendorong berkurangnya *fraud*. Biaya transaksi dapat dimanfaatkan oleh agen untuk menyembunyikan informasi, dimana informasi ini dianggap oleh agen tidak perlu diketahui oleh prinsipal. Informasi ini dapat digunakan oleh agen untuk tujuan tertentu, keadaan ini dapat mendorong seorang manajer untuk melakukan kecurangan.

1.2 Fraud

Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu tindakan yang tidak jujur oleh seorang karyawan yang menghasilkan keuntungan pribadi bagi karyawan tersebut yang merugikan pemberi kerja (perusahaan) (Kieso, Weygandt, Kimmel, 2018). Kecurangan merupakan tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok secara tidak adil, baik dilakukan secara langsung maupun tidak. Menurut (Dr.Meiryani, 2020) ikatan akuntansi Indonesia kecurangan akuntansi sebagai berikut: 1) salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, 2) salah saji yang timbul

dari perilaku tidak semestinya terhadap aktiva yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Fraud*

Komite audit dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan fungsi pengawasan internal, mengidentifikasi potensi resiko, memastikan laporan keuangan perusahaan akurat dan menunjukkan kinerja yang sebenarnya, membantu mengevaluasi prosedur dan kebijakan internal untuk mencegah *fraud*. Komite Audit juga berkolaborasi dengan auditor eksternal dalam rangka audit dan melaporkan dan memberi rekomendasi kepada dewan direksi terkait pencegahan *fraud* di perusahaan. laporan keuangan. Komite Audit dalam melaksanakan fungsinya bertindak secara independen, dengan tetap berkoordinasi dan memberikan nasehat kepada direksi, melakukan review dan diskusi pembahasan mengenai kinerja perseroan guna mendorong terciptanya mekanisme pengawasan yang baik guna meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam pelaporan perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Trijayanti et al., (2021) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh dalam mencegah terjadinya *fraud*.

H1: Komite Audit Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Menurunnya Fraud.

1.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Fraud*

Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham perusahaan baik oleh lembaga keuangan seperti dana pensiun, perusahaan investasi, perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas di mana kepemilikan Institusional merupakan mekanisme monitoring yang kuat yang dapat mencegah terjadinya *fraud*. Menurut (Jensen & Meckling, 1976) kepemilikan institusional dapat menjadi alat yang digunakan untuk mengurangi *agency conflict*. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, maka semakin kuat tingkat pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar atau eksternal terhadap perusahaan, sehingga kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer di suatu perusahaan akan semakin berkurang,

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Angel, 2021) berhasil membuktikan bahwa kepemilikan Institusional berpengaruh dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan

H2: Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Menurunnya fraud

1.5 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Terhadap *Fraud*

Kepemilikan manajerial dipandang dapat mengurangi terjadinya permasalahan didalam sebuah perusahaan, di mana kepemilikan manajerial ini berarti manajer memiliki peran sebagai pemilik atau pemegang saham, sehingga prinsipal (agen) akan bekerja sesuai dengan kepentingannya sebagai pemegang saham (principal). Dengan peran sebagai agen dan sekaligus prinsipal di waktu yang bersamaan, akan terjadi penurunan tingkat konflik kepentingan (Ferdinand & Santosa, 2019). Pada penelitian yang dilakukan oleh Azzah et al., (2021) berhasil membuktikan kepemilikan manajerial berpengaruh positif dalam mencegah *fraud*

H3: Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Menurunnya fraud

1.6 Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap *Fraud*

Pengendalian internal merupakan prosedur yang dibuat untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen, keandalan dalam pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas serta ketaatan pada hukum bisa dicapai oleh organisasi jika manajemen dapat mampu menerapkan prosedur pengendalian internal yang baik dan benar sehingga mampu mencegah terjadinya kecurangan.

Dalam penelitian yang dilakukan Dewi (2018) berhasil membuktikan pengendalian internal berpengaruh positif dalam mencegah terjadinya *fraud*.

H4: Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Menurunnya fraud

2. Metode Penelitian

Objek penelitian yang digunakan peneliti perusahaan yang masuk kategori perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2017-2021, unit amatan laporan keuangan tahunan, data berupa data sekunder yang diperoleh dari laman Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id dan www.idnfinancials.com. Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah non probabilistic sampling method, dengan teknik purposive sampling dimana pemilihan sampel ditentukan dengan kriteria yang ditentukan sebelumnya, yaitu (1) Perusahaan sektor Property and Real Estate, terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2017-2021. (2) Menerbitkan laporan keuangan tahunan selama periode amatan 2017-2021. (3) Data laporan keuangan terkait variabel penelitian lengkap.

Populasi Perusahaan *Property and Real Estate* sebanyak 86 perusahaan, yang terpilih menjadi sampel sebanyak 38 perusahaan dengan periode amatan selama 5 tahun, sehingga diperoleh sebanyak 190 laporan keuangan perusahaan sektor Property dan Real Estate untuk tahun 2017-2021

2.1 Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Beneish m-score. (Beneish, 1999) Di dalam penelitian variabel *Fraud* dibagi dalam dua kategori, yaitu perusahaan yang melakukan kecurangan atau *fraud* dan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan atau non *fraud*. Jika suatu perusahaan melakukan kecurangan maka Beneish m-score akan bernilai >-2.2 sebaliknya jika dibawah maka perusahaan tidak terdapat indikasi *Fraud*. Untuk keperluan pengukuran digunakan variabel dikotomi, dengan memberikan nilai 1 bagi perusahaan yang terindikasi melakukan kecurangan dan nilai 0 bagi perusahaan yang tidak terindikasi melakukan kecurangan ((Priswita & Taqwa, 2019), Persamaan yang digunakan menentukan *Fraud* sebagai berikut :

$$\text{Beneish M-Score} = -4.84 + 0.920 \text{ DSRI} + 0.528 \text{ GMI} + 0.404 \text{ AQI} + 0.892 \text{ SGI} + 0.115 \text{ DEPI} - 0.172 \text{ SGAI} - 0.327 \text{ LVGI} + 4.679 \text{ TATA}$$

Keterangan:

DSRI = *Days Sales in Receivable Index*

GMI = *Gross Margin*

AQI = *Asset Quality Index* SGI = *Sales Growth Index* DEPI = *Depreciation Index*

SGAI = *Sales and General Administrative Expense Index*

LVGI = *Leverage Index*

TATA = *Total Accruals to Total Assets*

Tabel 1: Rumus variable persamaan Beneish M-Score

No	Rasio Yang Dipergunakan	rumus
1	DSRI (<i>Days Sales Receivable Index</i>)	$\frac{\text{Receivables}_t / \text{Sales}_t}{\text{Receivables}_{t-1} / \text{Sales}_{t-1}}$
2	GMI (<i>Gross Margin Index</i>)	$\frac{(\text{Sales}_{t-1} - \text{Cost of goods sold}_{t-1}) / \text{Sales}_{t-1}}{(\text{Sales}_t - \text{Cost of goods sold}_t) / \text{Sales}_t}$
3	AQI (<i>Asset Quality Index</i>)	$\frac{1 - (\text{Current assets}_t - \text{Net fixed aassets}_t) / \text{Total assets}_t}{1 - (\text{Current assets}_{t-1} - \text{Net fixed aassets}_{t-1}) / \text{Total assets}_{t-1}}$

4	SGI (<i>Sales growth index</i>)	$\frac{Sales_t}{Sales_{t-1}}$
5	DEPI (<i>Depreciation index</i>)	$\frac{Depreciation_{t-1}/(Depreciation_{t-1} + PP\&E_{t-1})}{Depreciation_t/(Depreciation_t + PP\&E_t)}$
6	SGAI (<i>Sales, General, Administrative Expenses Index</i>)	$\frac{Sales, general, and administrative_t/Sales_t}{Sales, general, and administrative_{t-1}/Sales_{t-1}}$
7	LEVI (<i>Leverage Index</i>)	$\frac{(LTD_t - Current liabilities_t)/Total assets_t}{(LTD_{t-1} - Current liabilities_{t-1})/Total assets_{t-1}}$
8	TATA (<i>Total Accruals to Total Assets</i>)	$\frac{(Income from operating_t - cash flows from operating_t)}{total assets}$

Sumber: (Beneish., 1999)

2.2 Variabel Independen

2.2.1 Komite Audit

Komite audit merupakan sekumpulan orang yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan, dalam hal review atas SPI, kualitas laporan keuangan, efektivitas audit internal dan juga penelaahan atas resiko yang dihadapi perusahaan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015) Pengukuran mengacu pada penelitian Abidin et al.,(2020), sebagai berikut :

$$\text{komite audit} = \Sigma \text{ anggota komite audit}$$

2.2.2 Kepemilikan Institusional

Penelitian ini menggunakan bagian dari saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusi, baik itu perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi maupun perusahaan swasta . Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan skala rasio melalui jumlah saham yang dimiliki oleh institusi lalu dibandingkan dengan total saham yang beredar (Kusumawardana & Haryanto, 2019):

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Kepemilikan Institusional}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

2.2.3 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial menggunakan presentase kepemilikan saham oleh manajemen. Kepemilikan manajerial diukur menggunakan jumlah saham yang dimiliki manajemen dibandingkan seluruh saham yang beredar (Kusumawardana & Haryanto, 2019) , yakni:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah Saham Yang dimiliki Manajer}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

2.2.4 Pengendalian Internal

Pengendalian Internal Pengendalian internal merupakan elemen penting dalam mengelola perusahaan dan merupakan landasan bagi operasi industri yang sehat dan aman. Pengendalian internal adalah keseluruhan

tindakan yang berusaha untuk mendeteksi kesalahan, penipuan, dan penyimpangan untuk memastikan bahwa setiap transaksi benar diproses. Dalam pengukuran *fraud* ini peneliti menggunakan *metode internal control disclosure index* (ICD) metode ini merupakan metode skor yang digunakan untuk mengungkapkan pelaksanaan mekanisme pengendalian internal dalam laporan tahunan sehingga dapat melihat efektif tidaknya suatu pengendalian intenal. Penilaian efektivitas pengendalian internal ini menggunakan pernyataan yang dikeluarkan oleh manejemen mengenai efektivitas. Skor yang didapatkan dalam penelitian ini dengan memberikan nilai 1 (satu) jika sudah mengungkapkan item efektivitas pengendalian internal dalam annual report dan nilai 0 (nol) jika tidak mengungkapkan efektivitas pengendalian internal pada *annual report* (Thanh & Cheung, 2010)

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Uji Pooling

Berdasarkan hasil pengujian pooling data dengan $\alpha=5\%$, signifikansi level menunjukan lebih besar dari $\alpha=5\%$, Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan koefisien dan terima H_0 , berarti pooling data dapat dilakukan.

3.2 Statistik Deskriptif

Jumlah Komite Audit terkecil adalah 0 yang berarti terdapat perusahaan amatan yang tidak memiliki Komite Audit, untuk jumlah komite audit terbanyak 5 orang, sedangkan rata-rata Komite Audit data amatan sebanyak 3 orang. Jumlah saham yang dimiliki institusi yang terendah sebesar 0 yang berarti terdapat perusahaan yang sahamnya tidak dimiliki oleh institusional, Jumlah saham tertinggi yang dimiliki institusi sebesar 97,7%. Rata-rata data dari amatan saham yang dimiliki oleh institusional sebesar 54,4%. Kepemilikan saham oleh manajerial yang paling kecil 0 yang berarti terdapat perusahaan amatan yang sahamnya tidak dimiliki oleh manajer, Jumlah saham yang dimiliki oleh manajer terbanyak adalah 71%, sedangkan rata-rata dimiliki manajer sebanyak 5,44% .

Tabel 2: Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KA	190	0	5	2,98	0,686
KI	190	0,000	0,977	0,544	0,305
KM	190	0,000	0,710	0,054	0,152
Valid N (listwise)	190				

Sumber: Output SPSS 25

Dari data amatan seperti terlihat dalam tabel 3 memiliki jumlah sampel 190. Dari sampel penilitan sebanyak 58,9% atau 112 sampel yang tidak terindikasi melakukan dan terdapat 41,1% atau 78 sampel yang terindikasi melakukan kecurangan.

Tabel 3: Frekuensi *Fraud*

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak terindikasi melakukan kecurangan	110	57,9	57,9	57,9
terindikasi melakukan kecurangan	80	42,1	42,1	100.0
Total	190	100.0	100.0	

Sumber: Output SPSS 25

Dari data amatan nampak dari jumlah 190 Sampel penelitian sebanyak 28,9% atau 55 sampel tidak menyatakan efektivitas, dan 71,1% atau 135 sampel menyatakan efektivitas

Tabel 4: Frequensi Pengendalian Intern

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Perccent
Tidak Menyatakan Efektivitas	55	28,9	28,9	28,9

Menyatakan Efektivitas	135	71,1	71,1	100.0
Total	190	100.0	100.0	

Sumber: Output SPSS 25

3.3 Analisis Regresi Logistik

3.3.1 Menilai Kelayakan Model Regresi

Pada tabel 5 terlihat bahwa besarnya nilai Chi-square Hosmer and Lemeshow Goodness Of fit test sebesar 4,098 dengan probabilitas signifikansi 0,848 yang berarti $0,848 > 0,05$. Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dipakai untuk Analisa selanjutnya, karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.:

Tabel 5: Uji Kelayakan Model Regresi

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	4,098	8	0,848

Sumber: Output SPSS 25

3.3.2 Nilai Nagelkerke R^2

Berdasarkan tabel 6 yang diperoleh dari hasil regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi yang dilihat dari nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,004 atau 4%. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan variabel independen yaitu Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Pengendalian Internal dalam menjelaskan variabel dependen yaitu *fraud* hanya sebesar 4%. Hasil ini juga menunjukkan sebesar 96% dijelaskan oleh variabel-variabel diluar model penelitian.

Tabel 6: Koefisien Determinasi

Step	-2 Log Likelihood Block Number	Cox & Snell R Square	Nagerlkerke R Square
1	256,043	0,003	0,004

Sumber: Output SPSS 25

3.3.3 Matrik Klasifikasi

Berdasarkan tabel yang diperoleh dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kemampuan model dalam memprediksi terjadinya kecurangan atau tidak terindikasi melakukan kecurangan adalah sebesar 57,9%. dari tabel diatas kemungkinan perusahaan melakukan kecurangan adalah sebesar 42,1% dari total keseluruhan sampel sebanyak 190 data. Tingginya data presentase ketepatan tabel klasifikasi tersebut mendukung tidak adanya perbedaan yang signifikan terhadap data hasil prediksi dan data observasinya yang menunjukkan model regresi logistik yang baik.

Tabel 7: Koefisien Determinasi

<i>Observed</i>		tidak terindikasi melakukan kecurangan	terindikasi melakukan kecurangan	Percentage correct
<i>Fraud</i>	tidak terindikasi melakukan kecurangan	110	0	100
	terindikasi melakukan kecurangan	80		
<i>Overall Percentage</i>				57,9

Sumber: Output SPSS 25

3.3.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis untuk regresi logistik dilakukan menggunakan uji wald, hasil analisis ditunjukkan dalam tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7: Uji Wald

	B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Komite audit	0,011	0,227	0,002	1	0,962	1,011
Kepemilikan Institusional	-0,088	0,536	0,027	1	0,869	0,916
Kepemilikan Manajerial	0,192	1,016	0,020	1	0,862	1,212
Pengendalian Internal	0,239	0,355	0,452	1	0,502	1,269
Constant	-484	0,763	0,402	1	0,526	0,616

Sumber: Output SPSS 25

Variabel komite audit menunjukkan nilai signifikansi $0.962 > \alpha 0.05$, dengan demikian tidak tolak H_0 , yang berarti tidak cukup bukti Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan mengurangi *fraud*. Variabel Kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi $0.869 > \alpha 0.05$, dengan demikian tidak tolak H_0 , yang berarti Kepemilikan Institusional tidak cukup bukti berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan mengurangi *fraud*. Kepemilikan manajerial memiliki nilai signifikansi $0.862 > \alpha 0.05$, dengan demikian tidak tolak H_0 , yang berarti Kepemilikan Manajerial tidak cukup bukti berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan mengurangi *fraud*. Pengendalian Internal memiliki nilai signifikansi $0.502 > \alpha 0.05$, dengan demikian tidak tolak H_0 , yang berarti Pengendalian Internal tidak cukup bukti berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan mengurangi *fraud*.

4. PEMBAHASAN

4.1 Komite Audit

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan mengurangi *fraud*. Hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan dengan jumlah komite audit lebih banyak atau sedikit tidak berpengaruh terhadap kecenderungan mencegah *fraud*. Komite audit memiliki tugas utama yaitu membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas dan evaluasi terhadap operasional perusahaan. Komite audit juga perlu memahami bahwa peran komite audit sendiri untuk memastikan bahwa perusahaan telah memiliki program Anti-*fraud* dan pengendalian untuk membantu manajemen dalam pencegahan *fraud*.

Menurut Keputusan Ketua BAPEPA (2004) tentang pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit menyatakan bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sekurang-kurangnya membentuk komite audit yang beranggotakan satu orang komisaris independen dan dua orang berasal dari luar emitmen.

Tidak berperan komite audit terhadap kecenderungan mengurangi *fraud* dapat disebabkan berbagai faktor, antara lain kurangnya peran komite audit dalam melakukan pengawasan, selain itu pembentukan komite audit sendiri dianggap sebagai syarat untuk memenuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga kinerja komite audit pun tidak diberikan perhatian khusus. Hal ini dapat pula terjadi karena kurangnya anggota komite audit dengan keahlian di bidang keuangan, sehingga fungsi komite audit tidak efektif.

Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Triyani et. Al., (2021) yang menyatakan komite audit berpengaruh dalam mencegah terjadinya *fraud*.

4.2 Kepemilikan Institusional

Dari hasil penelitian ini menunjukkan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan mengurangi *fraud*. Hal ini menjelaskan bahwa kendatipun kepemilikan saham yang dimiliki institusional lebih dari 50%, namun kepemilikan ini tidak terkonsentrasi pada satu institusi, sehingga mekanisme monitoring tidak berjalan efektif karena institusi tidak memiliki akses terhadap informasi internal. Kepemilikan yang tidak terkonsentrasi menimbulkan kepentingan yang berbeda diantara institusi, sehingga mekanisme *monitoring* tidak dapat mengatasi kecenderungan manajemen didalam melakukan kecurangan laporan keuangan.

Kepemilikan Institusional merupakan mekanisme dari *corporate governance* yang dapat mengurangi terjadinya masalah keagenan tersebut, namun dalam penelitian ini mekanisme Kepemilikan Institusional belum dapat mengurangi masalah keagenan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Angela (2021) yang membuktikan kepemilikan institusional berpengaruh dalam mencegah terjadinya kecurangan.

4.3 Kepemilikan Manajerial

Dari penelitian ini menunjukkan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan mengurangi *fraud*. Hal ini dapat dijelaskan dari rata-rata kepemilikan oleh manajer atas saham perusahaan, dimana secara umum manajer hanya memiliki besaran prosentase 6%, dengan demikian hal ini tidak akan secara serta merta mendorong manajer bertindak sebagai seorang agen yang sekaligus prinsipal, dengan demikian perbedaan kepentingan *moral hazard* sebagai agen dengan agen sebagai prinsipal akan tetap terjadi yang otomatis belum dapat mengatasi kecenderungan dalam melakukan kecurangan. Rendahnya saham yang dimiliki oleh manajemen mengakibatkan pihak manajemen tidak merasa ikut memiliki perusahaan dikarenakan hal tersebut menyebabkan pihak manajemen tidak termotivasi untuk memaksimalkan kinerjanya.

Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Azzah et al. (2021) yang membuktikan kepemilikan manajerial berpengaruh positif dalam mencegah *fraud*.

4.4 Pengendalian Internal

Dari hasil penelitian ini menunjukkan Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan mengurangi *fraud*. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran para pekerja mengenai pentingnya pelaksanaan pengendalian internal, pelaksanaan pengendalian internal dianggap penting karena pengendalian internal bertujuan untuk menjaga aset atau keuangan dalam suatu perusahaan, dan kurang. Dari data sampel pengendalian internal sebesar 71,1% sampel menyatakan efektivitas pengendalian internal dan dalam data sampel *fraud* terdapat 42,1% sampel yang terindikasi melakukan *fraud*, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengendalian internal belum berjalan optimal sehingga belum dapat mengurangi dan mencegah terjadinya *fraud*.

Penelitian ini tidak dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018) yang menjelaskan pengendalian internal berpengaruh positif dalam mencegah *fraud*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwasanya variabel komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan pengendalian internal tidak cukup bukti berpengaruh terhadap kecenderungan mengurangi *fraud*.

Saran yang dapat diberikan bagi peneliti yang akan datang adalah diharapkan untuk melakukan perpanjangan pada periode observasi, dan lebih baik untuk menggunakan periode terbaru agar data yang diperoleh lebih aktual. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan berbagai variabel independen yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Abidin, J., Pamulang, U., Lestari, S. A., & Pamulang, U. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol 4 no.1, 48-57
- Alice, A., & Christian, N. (2022). Efektivitas Komite dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan terhadap Pencegahan Kejahatan Keuangan. *Owner Riset & Jurnal*, vol.6 No. 1, 176–188.
- Association of Certified *Fraud* Examiners Indonesia. (2019). Survei *Fraud* Indonesia 2019. *Indonesia Chapter #111*, 53(9), 1–76.
- Bernard, V., Ciesielski, J., Deangelo, L., Fridson, M., Harvey, C., Lee, C., Press, E., Whaley, B., & Zmijewski, M. (1999). The Detection of Earnings Manipulation Messod D . Beneish * June 1999 Comments Welcome. *Financial Analysts Journal*, 5(June), 24–36.

- Damayanti, A. F., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal, Good Corporate Governance, dan Sistem Pengukuran Kinerja. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 3(2), 1–14.
- Ferdinand, R., & Santosa, S. (2019). Factors that Influence *Fraudulent* Financial Statements in Retail Companies - Indonesia. *JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance)*, 2(2), 99
- Ijudien, D. (2018). *Pengaruh stabilitas keuangan, kondisi industri dan tekanan eksternal terhadap kecurangan laporan keuangan*. 2(1), 82–97.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership, Journal of Financial Economics*, V. 3 (October), No. 4, pp. 305-360
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88 /Pmk.06/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan. 1–32.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Kusumawardana, Y., & Haryanto, M. (2019). Manajerial Terhadap Manajemen Laba. *Diponegoro Journal of Management*, 8(2), 148–158
- Muhammad Idris. (2020). Jejak-hitam PT. Hanson International Manipulasi Laporan Keuangan 2016. *Kompas.com*<https://money.kompas.com/read/2020/01/15/160600526/jejak-hitam-pt-hanson-international-manipulasi-laporan-keuangan-2016?page=all>
- Oetary Triyani, Kamalia, A. (2019). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderating*. *Jurnal Ekonomi* 27–36.
- Prasetyo, A. B. (2014). *Pengaruh Karakteristik Komite Audit Dan Perusahaan Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang*. 1–24.
- Priswita, F., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(4), 1705–1722.
- Sari, P. N., & Husadha, C. (2020). Pengungkapan Corporate Governance Terhadap Indikasi *Fraud* dalam Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(1), 46–56.
- Trijayanti, I., Hendri, N., & Sari, G. P. (2021). Pengaruh Komite Audit, Audit Internal, Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan *Fraud*. *4th Proceeding Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 30–42.
- Zarlis, D. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Di Rumah Sakit (Studi Empiris Pada Rumah Sakit Swasta Di Jabodetabek). *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(2), 206–217.